

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DAN INFLIKASINYA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Oleh
Khodijah Ishak, SH.I, M.E.Sy

ABSTRAK

Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial adalah fakta bahwa berbagai kejahatan social seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jual beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Di lihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan berisiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup (pekerjaan). Oleh karena itu, pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar program yang dilakukan dapat menanggulangi masalah pengangguran.

Kata Kunci: *Pembangunan, Inflasi, dan Indeks Pembangunan*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri Amin 2007).

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan

kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 261.890.900 yang merupakan penduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Adapun jumlah angka penduduk Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia

NO	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA				
	PROVINSI	2017	%	2035	%
1	JAWA BARAT	48,037,600	18.34%	57,137,300	18.69%
2	JAWA TIMUR	39,293,000	15.00%	41,127,700	13.46%
3	JAWA TENGAH	34,257,900	13.08%	37,219,400	12.18%
4	SUMATERA UTARA	14,262,100	5.45%	16,073,400	5.26%
5	BANTEN	12,448,200	4.75%	16,033,100	5.25%
6	DKI JAKARTA	10,374,200	3.96%	11,459,600	3.75%
7	SULAWESI SELATAN	8,690,300	3.32%	9,696,000	3.17%
8	LAMPUNG	8,289,600	3.17%	9,136,100	2.99%
9	SUMATERA SELATAN	8,267,000	3.16%	9,610,700	3.14%
10	RIAU	6,657,900	2.54%	9,363,000	3.06%
11	SUMATERA BARAT	5,321,500	2.03%	6,130,400	2.01%
12	NUSA TENGGARA TIMUR	5,287,300	2.02%	6,829,100	2.23%
13	ACEH	5,189,500	1.98%	6,541,400	2.14%
14	NUSA TENGGARA BARAT	4,955,600	1.89%	5,754,200	1.88%
15	KALIMANTAN BARAT	4,932,500	1.88%	5,878,100	1.92%
16	KALIMANTAN TIMUR	4,266,500	1.63%	5,929,200	1.94%
17	BALI	4,246,500	1.62%	4,912,400	1.61%
18	KALIMANTAN SELATAN	4,119,800	1.57%	5,016,300	1.64%
19	DI YOGYAKARTA	3,762,200	1.44%	4,348,500	1.42%
20	JAMBI	3,515,000	1.34%	4,322,900	1.41%
21	PAPUA	3,265,200	1.25%	4,144,600	1.36%
22	SULAWESI TENGAH	2,966,300	1.13%	3,640,800	1.19%
23	KALIMANTAN TENGAH	2,605,300	0.99%	3,494,500	1.14%
24	SULAWESI TENGGARA	2,602,400	0.99%	3,458,100	1.13%
25	SULAWESI UTARA	2,461,000	0.94%	2,743,700	0.90%
26	KEP. RIAU	2,082,700	0.74%	3,050,500	1.00%
27	BENGKULU	1,934,300	0.74%	2,360,600	0.77%
28	MALUKU	1,744,700	0.67%	2,227,800	0.73%
29	KEP. BANGKA BELITUNG	1,430,900	0.55%	1,911,000	0.63%
30	SULAWESI BARAT	1,331,000	0.51%	1,763,300	0.58%
31	MALUKU UTARA	1,209,300	0.46%	1,603,600	0.52%
32	GORONTALO	1,168,200	0.45%	1,430,100	0.47%
33	PAPUA BARAT	915,400	0.35%	1,305,000	0.43%
34	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-
	TOTAL	261,890,900	100%	305,652,400	100%

SUMBER: BPS INDONESIA

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 1980 sebesar 146.777.000 sampai pada tahun 2017 sebesar 261.890.900 jiwa (BPS, 1980 dan 2017). Kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan jumlah pengangguran, hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk tidak terserap ke lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun naik.

B. PEMBAHASAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Menurut Kwik Kian Gie, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ketua Bappenas) mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran.¹

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Di Indonesia angka pengangguran makin meningkat.

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan disetiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena kondisi ekonomi, Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, Pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di

¹Dikemukakan Kwik pada seminar “*Pasar Kerja yang Ramah Pasar*” di Hotel Borobudur Jakarta, 9 September 2003

lapangan kerja setiap tahun selalu meninggkat tidak pernah mengalami penurunan, budaya suatu daerah dimana yang berkerja itu hanya perempuan saja sementara kaum adam tidak berkerja, Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negatif dari hal ini salah satunya tingkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional. Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya seperti yang sudah diterangkan di atas. Di samping itu tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya. Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporak porandakan tatanan kehidupan bangsa. Menurut data BPS angka pengangguran penduduk Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Agustus 2016–Agustus 2017**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun Lalu	Semester Lalu	Saat Ini	Perubahan 1 Tahun		Perubahan 1 Semester	
	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	(Ags 2016–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)	(Feb 2017–Ags 2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Juta Orang			Juta Orang	Persen	Juta Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	189,10	190,59	192,08	2,98	1,58	1,49	0,78
Angkatan Kerja	125,44	131,55	128,06	2,62	2,09	-3,49	-2,65
Bekerja	118,41	124,54	121,02	2,61	2,20	-3,52	-2,83
Pengangguran	7,03	7,01	7,04	0,01	0,14	0,03	0,43
Bukan Angkatan Kerja	63,66	59,04	64,02	0,36	0,57	4,98	8,43
Sekolah	15,92	15,24	16,49	0,57	3,58	1,25	8,20
Mengurus Rumah Tangga	39,34	36,08	39,92	0,58	1,47	3,84	10,64
Lainnya	8,40	7,72	7,61	-0,79	-9,40	-0,11	-1,42
	Persen			Poin		Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,61	5,33	5,50	-0,11		0,17	
Perkotaan	6,60	6,50	6,79	0,19		0,29	
Perdesaan	4,51	4,00	4,01	-0,50		0,01	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,34	69,02	66,67	0,33		-2,35	
Laki-Laki	81,97	83,05	82,51	0,54		-0,54	
Perempuan	50,77	55,04	50,89	0,12		-4,15	

Dilihat dari tabel 2 tersebut di atas. Tingkat pengangguran penduduk Indonesia pada tahun 2017 naik dari 7,04, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta jiwa atau menurun tipis dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 7,02 juta jiwa. Menurut Suhariyanto menjelaskan, lebih rendahnya angka pengangguran ini karena berkurangnya pengangguran di pedesaan. "Pengangguran Indonesia turun menjadi 7,01 juta. Ini lebih rendah dari periode sebelumnya, karena di desa ada penurunan jumlah pengangguran penurunan angka pengangguran di desa turun dari 4,35% menjadi 4%. Dari data BPS, tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,33%, sementara pada Februari 2017 sebesar 5,50%. Porsi paling besar dari pengangguran ada di perkotaan dengan 6,5%.

Pengangguran menurut Keynes dianggap selalu wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.²

Dalam menangani masalah pengangguran Pemerintah harus cepat tanggap dalam pemecahan masalah pengangguran. Masalah Pengangguran memang tidak mudah, Pemerintah harus mengikutsertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Sebuah Negara yang ingin berubah harus meningkatkan tingkat pendidikannya. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang kompeten maka akan mampu mengurangi angka pengangguran.

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa Negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memilli kekurangan tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan *softskill* budaya malas yang masih

²Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981). Hal. 169

menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

Menurut Sukirno (2006) sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis yaitu:³

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
2. Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
3. Pengangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

Menurut Badan Pusat Statistik kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja. Faktor selanjutnya adalah tingkat upah. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labo force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.⁴

Linbeck (1999) menyatakan bahwa pengangguran merupakan akibat dari kesalahan kelembagaan dalam instansi pemerintah maupun swasta yang berimbas pada pengaturan pasar, demografis, hukum dan regulasi. Pentingnya fitur kelembagaan dalam kaitannya dengan pengangguran berimplikasi pada permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengaturan upah, hingga efektifitas pencarian dan pencocokan di pasar tenaga kerja.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan disetiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.⁵

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpelehet kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “ kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran.

Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negaran-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman

³ Sukirno, Sadono, 2006, 'Makro Ekonomi Teori Pengantar', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁴ Muana, Nanga. *Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan*. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 253

⁵ Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di indonesia, *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012, 85-10.*

masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rizki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizki dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rizki. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizki tersebut.

Untuk itu Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluknya yang bernyawa sebagai mana yang tersebut dalam surat Al-Huda ayat 6” *Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (laukhil mahfuzd).namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagai mana dijelaskan Allah dalam surat Ar-Ra’ad ayat 11” Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka”*. Dan surat an-nahal ayat 97 “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Berdasarkan Surat An-Nahal ayat 97, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan. Pada ayat tersebut terdapat tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”, Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Oleh karena itu, semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Menurut Muhammad Al Bahi, mengatakan bahwa ada tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu:

1. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi.
2. Bertawakal kepada Allah, berlindung dan mememinta pertolongan kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan.

3. Percaya kepada Allah bahwa Dia mampu menolak bahaya, kesombongan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.⁶

Faktor apapun yang menyebabkan angka pengangguran sulit di reduksi, untuk itu pemerintah harus fokus dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Angka penduduk yang tinggi erat kaitannya dengan masalah yang mengkhawatirkan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia adalah pengangguran. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan inflikasinya terhadap pembangunan Indonesia.

1. Dampak

Indonesia sedang mengalami perubahan perekonomian, dimana Indonesia sedang melakukan perubahan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Dengan meningkatnya perekonomian kearah industri diharapkan perekonomian Indonesia, jauh lebih baik. Dalam banyaknya tingkat pengangguran sangat berdampak ke berbagai sektor.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991: 482)⁷

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur

⁶Alghofari, Farid.2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Undip

⁷Al-Ghazali, Abu Hamid. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.

utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008: 318).⁸

Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran (Riska Franita, 2016)

1. Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.
2. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka.
3. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
5. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan.
6. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya.
7. Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkat laju perekonomiannya.

Menurut Muhadir Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian:⁹ Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu: **Pertama**, dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara.

⁸ Karim, Adiwarmun Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁹Muhadir, *Potret ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- 3) Pengangguran tidak menggalahkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

Kedua, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya: (a) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian; (b) Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan; (c) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

Menurut Syahrial bahwa pengangguran akan berakibat buruk terhadap perekonomian adalah:

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang di capai adalah lebih rendah dari tingkat yang akan dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian tingkat

pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

- c. Pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini jelas bahwa pengangguran tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang.¹⁰

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial:

1. Menurunkan Aktivitas Perekonomian

Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini menyebabkan para pengusaha dan investor tidak bersemangat melakukan perluasan dan mendirikan industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun.

2. Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan perkapita. Jika pendapatan perkapita turun maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut turun.

3. Biaya Sosial Meningkat

Pengangguran juga mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya, seperti biaya perawatan pasien yang stress (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat domenstrasi dan kerusakan yang di picu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

4. Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

5. Penerimaan Negara Menurun

¹⁰Syahril, *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap pengangguran di kabupaten aceh*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, volume 1 nomor 2 november 2014

Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan). Itu artinya semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang di peroleh dari pajak penghasilan.

6. Bertambahnya Tindakan Kriminal

Seseorang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya terutama makan agar tetap bisa bertahan hidup. Seorang yang tidak memiliki pekerjaan yaitu pengangguran bisa saja melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet, menjambret atau bahkan sampai membunuh demi mendapatkan sesuap nasi.

7. Meningkatnya Pengamen dan Pengemis

Tak berbekal pendidikan dan keterampilan seorang pengangguran tidak jarang memilih untuk mengandalkan belas kasihan orang lain dengan cara mengemis.

Sementara jika dilihat dalam kacamata Islam pengangguran mempunyai dampak sebagai berikut:

1. Pengangguran berdampak terhadap miskin.

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur karena pengangguran merupakan satu hal yang menyebabkan kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain, demi terbutuhnya kebutuhan pribadi.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang, semangkin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meingkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan, karena tidak memiliki pendapatan.¹¹

Berdasarkan keyakinan bahwa kualitas input tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sehingga dengan pembanguana ekonomi yang bagus otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat.

2. Pengangguran akan membahaya aqidah

Pengangguran dapat membahayakan aqidah terutama pada masyarakat yang miskin. Dalam keadaan ini dapat menbarkan benih-benih keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pemberian rezeki. Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial, dapat menimbulkan ketimpangan akidaah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa rasulullah bersabda: “Kemiskinan dapat mengakibatkan kekufuran.

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:” Telah menceritakan kepada waki, telah menceritakan padaku

¹¹Adit Agus Prayetno, Analisis fator-faktor yang mempengaruhi pengangguran tingkat kemiskinan studi kasus 35 kota kabupaten/ kota di jawa tengah 2003-2017. Universitas di ponegoro

Ustman asy syahruam dari muslim bin abu bukhrah dari ayahnya nabi saw bersabda” Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Kekafiran dan azab kubur.

2. Kebijakan Terhadap Pengangguran

Untuk menghindari efek pengangguran, pemerintah terus secara terus menerus mengatasi masalah pengangguran. Sukirno (2006) dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik, tujuan bersifat ekonomi terdiri dari: (1) menyediakan lowongan pekerjaan, (2) Menyediakan tarap kemakmuran masyarakat, (3) memperbaiki pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan bersifat sosial dan politik adalah: (1) meningkatkan kemakmuran keluarga dan kesetabilan keluarga, (2) menghindari masalah kejahatan, (3) mewujudkan kestabilan politik.¹²

Dalam menangani masalah pengangguran, pemerintah dapat menempuh beberapa macam kebijakan sebagai mana telah diungkapkan di landasan teori. Tujuan harus dikombinasikan antara tujuan ekonomi, sosial, dan juga politik agar mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berikut disajikan uraian mengenai kebijakan yang secara normative harus dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai mana disampaikan oleh Sadono sukirno (2006) sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 kebijakan makro merupakan wewenang pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.¹³

Hal ini terkait dengan fungsi alokasi atas anggaran yang mengundang arti bahwa anggran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efensiensi dan efektifitas perekonomian (penjelasan keuangan Negara). Menurut Puput Haryanto Kebijakan yang secara normatif hartus dilakukan pemerintah terkait mengatasi pengangguran antara lain:¹⁴

a. Kebijakan Fiskal

Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang perpajakan, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran/ permintaan agregat dalam perekonomian kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat di atur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu (1) Kebijakan moneter *expansife/*

¹² Sandono Sukirno, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

¹³ Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁴ Puput Haryanto, *Kebijakan Makro Pemerintah Memberantas Pengangguran*,

monetary expansive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.(2) Kebijakan moneter *ontrative/monatery contrative*. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan uang ketat (*tigh money policy*).

c. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan (*income policy*) atau juga kebijakan harga dan upah (*price and wage policy*) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. contohnya: kebijakan upah minimum (UMR), kebijakan harga tertinggi (*ceiling price policy*) dan lain-lain.

d. Kebijakan ekonomi Internasional/Perdagangan luar negeri

Kebijakan ekonomi internasional (*International economic policy*) adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota dan lain-lain.

Menurut Totok Haryanto pada dasarnya kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran harus bertumpu pada peningkatan investasi di sektor riil, khususnya pada sektor pertanian dan sektor industri. Dengan adanya investasi pada sektor pertanian dan industri maka akan tercipta permintaan akan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah:¹⁵

1. Mempermudah dalam perijinan untuk investasi pada sektor industri dan pertanian.
2. Meningkatkan program padat karya untuk pembangunan di sektor pekerjaan umum.
3. Disinsentif untuk sektor jasa yang kurang menyerap tenaga kerja
4. Perubahan sistem pemberian pinjaman atau kredit.
5. Asuransi pengangguran untuk meminimalkan dampak psikologis dan sosial
6. Pengembangan dan insentif untuk penciptaan kewirausahaan
7. Membentuk serikat pekerja yang kuat untuk menimumkan angka pengangguran friksional
8. Membentuk lembaga pelatihan di perguruan tinggi untuk menekan pengguran struktural.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia dengan cara:

1. Memperluas kesempatan kerja: Kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu: a) pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya (yang dapat menyerap relatif

¹⁵ Totok Harjanto, *Pengangguran Dan Pembangunan Nasional*, Jurnal Ekonomi, Vol. 2 , No.2 , Januari 2014

banyak tenaga kerja). b) melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan.

2. Menurunkan jumlah angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan.

Dalam sistem negara Islam, khalifah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada orang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Rasulullah bersabda:” Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat ia akan diminta pertanggung jawaban terhadap urusan rakyat. (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw secara praktis senantiasa berupaya memberi peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda yang artinya:” Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk berkerja.

Mekanisme yang dilakukan oleh khalifah dalam mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Individu

Dalam mekanisme ini pemerintah secara langsung memberikan pemahaman secara individu terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya berkerja dan kedudukan orang-orang yang berkerja di hadapan Allah swt. Serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk berkerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup banyak nash Al-qur’an maupun As-Sunah yang memberikan dorongan kepada individu untuk berkerja misalnya firman Allah surat Al-Muluk ayat 67 yang artinya:” ***Berjalanlah kalian disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.*** Jelas bahwa Islam mewajibkan kepada individu untuk berkerja, ketika individu yang tidak berkerja baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk berkerja maka pemimpin berkewajiban untuk memaksa individu berkerja serta menyediakan sarana dan prasarannya, termasuk di dalam pendidikan.

2. Mekanisme Sosial Ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh pemimpin melalui sistem kebajikan, baik kebajikan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran. Dalam bidang ekonomi kebajikan yang dilakukan oleh pemimpin adalah meningkat dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

3. Inflikasi

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya.

Oleh karena itu, masalah pengangguran harus diminimalisasi agar tidak berdampak terhadap kemiskinan. Dalam mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan angka pengangguran dan mengatasi masalah ketenagakerjaan, diantaranya:

Pertama, dalam pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diarahkan pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Guna menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Program-program yang terkait dengan kebijakan fiskal dan pemberdayaan UKM meliputi: (a) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K); (b) Kelompok Usaha Bersama (KUBE); (c) Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); (d) Program Pengembangan Kecamatan (PPK); (e) Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE).

Kedua, Sinergisitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan satu Potret masalah Pengangguran Indonesia. Untuk itu berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum mampu mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jual beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran.

Di lihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan berisiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup (pekerjaan).

Oleh karena itu, Pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam

memecahkan permasalahan pengangguran. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar program yang dilakukan dapat menanggulangi masalah pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Adit Agus Prayetno, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tingkat kemiskinan studi kasus 35 kota kabupaten/ kota di Jawa Tengah, 2003-2017*. Universitas di Ponegoro.

Adiwarman Azwar, Abu Hamid, Karim,. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Ghazali,1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam Madinah.

Amri Amin,2007, “Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia”. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran Vol. 1 no. 1,2007*, Jambi.

Alghofari, Farid.2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia, Tahun 1980-2007*.Undip

Kwik 2003,“Pasar Kerja yang Ramah Pasar” di Hotel Borobudur Jakarta, 2003

Puput Haryanto, *Kebijakan Makro Pemerintah Memberantas Pengangguran,*

Muhadir, *Potret ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

Nanga Muana, *Makro Ekonomi: teori, masalah dan kebijakan*. Edisi Revisi.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Riska Franita 2016, *Analisis Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, volume 1 Desember 2005*

Syahril, *Analisi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap pengangguran di kabupaten aceh*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, volume 1 nomor 2 november 2014

Sandono Sukirno, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Todaro, P Michael.1988. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3*. Jakarta: Erlangga.

Tulus T.H. Tambunan. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Totok Harjanto, *Pengangguran Dan Pembangunan Nasional*, Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No.2 Januari 2014

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Zulfahmi, Adrian Sutawijaya, *Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012*.